



## BERITA UTAMA

# Beri Ruang Mencari Nafkah

### Tidak Melarang Otoped di Semua Lingkungan Jogja

**JOGJA, Radar Jogja** – Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Ardiyanto turut melontarkan pendapat dalam menyikapi kembali maraknya penyewaan skuter listrik dan otoped. Menurutnya, pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Tidak melarang operasionalnya di semua lingkungan Kota Jogja.

Politisi dari Fraksi PDIP itu menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tidak semestinya melarang operasional skuter listrik dan otoped di seluruh wilayahnya. Fokki menilai, semestinya ada kebijakan yang berpijak pada rakyat. "Pemerintah harus memberi ruang pada mereka, dikarenakan pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka," ujarnya dihubungi wartawan kemarin (21/7).

Ditegaskan, ada konstitusi yang mengatur hak rakyat dalam mencari nafkah. Rakyat diperkenankan untuk memperoleh pendapatan yang layak. "Maka kewajiban negara untuk menerima. Maka dalam konteks ini, skuter harus diberi ruang," ucapnya.

Fokki pun berpendapat, relokasi skuter listrik dan otoped harus tetap memperhatikan pendapatan pelaku penyewaan. Sebab relokasi ke tempat yang dinilai kurang memiliki daya tarik wisata dapat merugikan masyarakat. "Ketika memberi ruang khusus itu, (harus yang bisa, Red) laku. Kalau memberi spot tapi nggak laku, namanya proses pemiskinan rakyat," ketusnya.

Fokki lantas menyinggung, tetap diperkenankannya becak motor (bentor) beroperasi di sumbu filosofis. Sementara operasional skuter listrik dan otoped di kawasan yang sama, dilarang. "Saya sangat sepakat ketika, skuter harus bisa ditata dengan baik. Tapi jangan terbang pilih," Fokki menekankan.

Sementara anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba menemukan fakta menarik, yakni skuter listrik masih beroperasi. Meskipun



**DISEWAKAN:** Pekerja mengeluarkan sejumlah skuter listrik yang disimpan di sebuah bangunan kosong yang tepat berada di sisi selatan gerbang Kantor Kependudukan, Malioboro, Kota Jogja.

sudah dilarang oleh Pemkot Jogja. "Ini membuktikan bahwa tidak ada itikad baik dari oknum pengelola skuter listrik untuk mematuhi aturan yang ada dan ditengarai sulit untuk ditata agar kedepannya lebih baik," sebutnya.

Forpi Kota Jogja mendukung langkah Pemkot melarang pengoperasian skuter listrik di seluruh Kota Jogja. Tapi ditegaskan, harus diikuti pula dengan pengawasan serta sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. "Dan perlu dukungan se-

mua pihak termasuk dukungan dari pihak pengelola skuter listrik," lontarnya.

Dinilai, aturan yang terus-menerus dilanggar, sama dengan menyepelekan kewibawaan pemimpin. Maka disarankan, peraturan walikota (Perwal) segera diterbitkan. Selain itu, diundang seluruh penyewaan jasa skuter listrik untuk duduk bersama membahas hak dan kewajibannya. "Terakhir jika telah ada kesepakatan bersama, sanksi tegas harus ditegakkan," tandasnya. **(fat/bah/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005